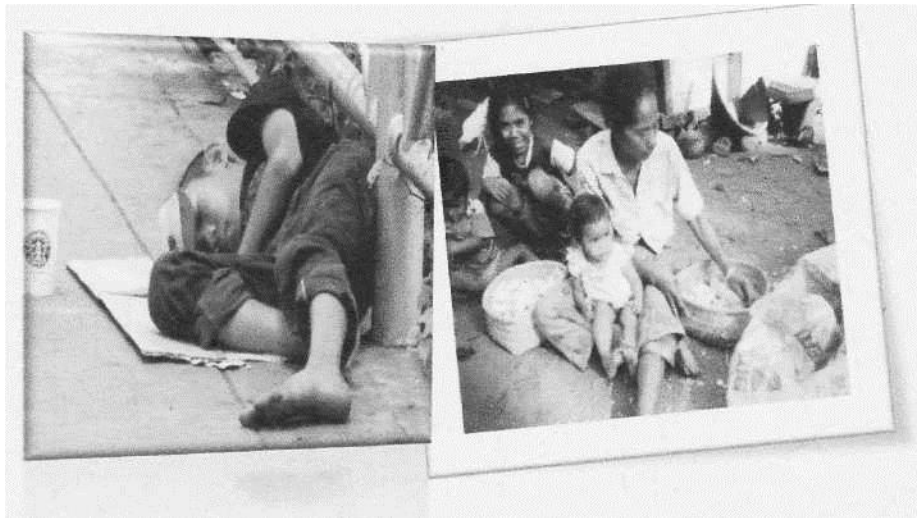


EKSKLUSI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN
Makna, Fokus dan Dimensi untuk Kajian Sosiologis



M. Fadhil Nurdin, Ph.D

Makalah disajikan pada
Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia
dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV
Manado, 20-23 Mei 2015

DEPARTEMEN SDSIDLGI
FAKULTASILMU SDSIAL DAN ILMU PDLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2015

EKSKLUSI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN: Makna, Fokus dan Dimensi untuk Kajian Sosiologis*

M. Fadhil Nurdin, PhD

Abstrak

Makalah ini membicarakan tentang eksklusi sosial dan pembangunan dengan fokus pada makna, fokus dan dimensi untuk kajian sosiologis. Transformasi global dapat menorehkan kemakmuran ekonomi, di sisi lain melahirkan pelbagai masalah kemanusiaan. Kondisi ini sesuai dengan makna eksklusi sosial yang menggambarkan kemiskinan, menganggur dan hidup dalam kekurangberuntungan; tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan; dan kehancuran ikatan sosial. Ciri-ciri eksklusi sosial meliputi ekonomi, sosial, politik, kejiwaan, individu dan kumpulan. Dampak kemiskinan; ketiadaan perumahan, pendidikan rendah, kemahiran terbatas, gangguan kesehatan, pengangguran, orang kurang upaya, dan ibu tunggal. Dimensi eksklusi sosial ini tidak dapat dipisahkan manakala melihat satu masalah sosial kerana dipengaruhi oleh dimensi yang lain, sebab masalah-masalah sosial dan keluarga sangat kompleks dan boleh dilihat dari pelbagai dimensi. Eksklusi sosial diukur dari pendapatan rendah, keadaan lemah, fasilitas masyarakat terbatas, peranserta terbatas, kekurangan peluang kerja dan perkhidmatan sosial. Karena itu, aktivitas kebijakan, perencanaan dan layanan sosial perlu dilakukan agar dapat menyumbang untuk menyelesaikan dan mempromosikan eksklusi sosial, mendukung keluarga agar hidup lebih baik.

Kata kunci: eksklusi sosial, pembangunan, isu dan tantangan global, kebijakan sosial.

Pendahuluan

Perkembangan dan perubahan sosial akhir-akhir ini semakin menunjukkan dinamika yang pesat dan cenderung radikal. Salah satu pendorong besar bagi perubahan sosial tersebut adalah globalisasi. Globalisasi dibentuk oleh politik dan ideologi neoliberalisme. Neoliberalisme berakar pada ekonomi neo-klasik; inti ajarannya menekankan pentingnya kebebasan, khususnya kebebasan ekonomi dari campur tangan negara. Negara dipandang sebagai penghambat mekanisme pasar dan karenanya mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan neoliberalisme, kekuatan globalisasi tidak ada yang meragukan.

*) Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

Bermula dari Universitas Chicago, hembusan globalisasi kini menguasai jaringan internasional yang mengisi setiap relung pemikiran ilmuwan sosial dan juga para sosiolog. Seakan-akan, pembangunan dunia ini tidak memiliki alternatif lain, selain mengikuti pendekatan neoliberalisme. Kenyataannya, antara globalisme dan neoliberalisme adalah dwitunggal yang sulit dipisahkan. Kehidupan individu, kelompok, maupun masyarakat tidak lagi dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi, penyebaran informasi, gaya hidup konsumtif, bentuk ancaman keamanan yang baru dan fitur-fitur globalisasi lainnya. Laju pembangunan ekonomi sedemikian rupa telah mengarahkan kehidupan masyarakat yang lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat personal dan artifisial, tidak lagi komunal dan kualitas nilai, sehingga globalisasi tidak hanya membawa kemajuan tetapi juga memberikan gejala-gejala negatif di masyarakat.

Isu Global dan Eksklusi Sosial

Dampak globalisasi mengagumkan; akumulasi kekayaan dunia pada periode 1986-2000 melonjak dari 7,2 triliun dollar AS menjadi 27 triliun dollar AS. Jumlah penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan absolut menurun dari 29 % (1990) menjadi 23 % (1999). Angka partisipasi Sekolah Dasar juga meningkat dari 80 % (1990) menjadi 84 % (1998). Sejak tahun 1990, sekitar 800 juta dan 750 juta orang telah memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi secara berturutan. Namun, globalisasi juga telah membawa penderitaan baru bagi dunia. Potret kondisi kehidupan di negara-negara berkembang masih tetap atau bahkan semakin terbelakang. Seperti dilaporkan UNDP; *"But in a globalizing world the increasing interconnectedness of nations and peoples has made the differences between them more glaring."* Penemuan teknologi baru dan peningkatan integrasi ekonomi telah membuka kesempatan ekonomi global yang luar biasa. Tetapi di balik kemakmuran yang umumnya

*] Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

dialami negara-negara maju itu, kini masih terdapat 2,8 milyar orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari (UNDP, 2002).

Kegagalan globalisasi, menurut Paul Krugman, David Korten, Noreena Hertz, Edward Luttwak, William Greider, dan peraih Nobel Ekonomi 2001, Joseph E. Stiglitz menunjukkan bahaya globalisasi. Globalisasi didasari ideologi *free market fundamentalism* yang patuh pada mitos "*the invisible hand*" dan antipati terhadap peran negara (Stiglitz, 2003). Kenyataannya, sistem ini tidak mampu mengatur pasar di negara berkembang, karena ketidaksempurnaan informasi dan ketidaklengkapan pasar. Dalam kondisi seperti ini, intervensi negara diperlukan untuk merespon ketidak-sempurnaan dan bahkan kegagalan pasar. *Kedua*, globalisasi memperkokoh hegemoni perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs). Di balik kedok globalisasi, bersembunyi wajah neoliberalisme, dan di belakang neoliberalisme berjajar MNC yang memiliki kepentingan menguasai ekonomi dunia. Kelimpahan kekayaan MNC membuat mereka dapat memaksa negara/kepala pemerintahan bertekuk lutut. *Ketiga*, bahaya globalisasi tidak hanya disebabkan oleh saratnya muatan ideologi neoliberalisme dan kepentingan kapitalis dunia. Lebih jauh, ia disokong oleh tiga lembaga internasional penting: Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO) yang sanggup mencengkram dunia.

Dunia dan perubahan sosial berlangsung cepat dan masif, menyentuh setiap sisi kehidupan umat manusia. Kehidupan politik dan kemenangan demokrasi serta keunggulan kapitalisme atas sosialisme telah menawarkan peningkatan interaksi dan kolaborasi antar-peradaban yang kemudian memperkuat hegemoni globalisasi. Fenomena globalisasi pun turut menyebabkan eksklusi sosial.

*) Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

Makna eksklusi sosial menggambarkan *hidup dalam kemiskinan, menganggur dan hidup dalam kekurangberuntungan; tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan; dan kehancuran ikatan sosial*. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor keuangan yang tidak cukup, ketidakmampuan atau dari kelompok etnik yang berbeda; mereka tersingkir karena prasangka dan stigmatisasi kebijakan dan struktur masyarakat yang lebih luas. Eksklusi sosial terjadi ketika ada kelompok mengalami perbedaan perlakuan, dimana setiap manusia berhak menerima perlindungan dan kesejahteraan. Beall dan Piron (2005) menjelaskan bahwa *Social Exclusion* merupakan suatu proses peminggiran sosial terhadap beberapa kelompok yang didiskriminasikan atas dasar etnis, ras, agama, orientasi seksual, kasta, keturunan, gender, usia, kecacatan, HIV, migran atau berdasarkan lokasi di raana mereka tinggal. Mereka juga dirugikan karena lokasi tempat tinggal tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan.

Tantangan Global dan Pembangunan

Tantangan dalam konteks pembangunan, Bob Deacon (2000) dan Ramesh Mishra (1999), sudah lama mengusulkan soal "*international social policy*, dan pentingnya keterlibatan para ilmuwan sosial sebagai analis dan perancang kebijakan sosial internasional. Ilmuwan aktivis dan analis kebijakan sosial adalah dua peranan penting dalam pembangunan yang intinya difokuskan pada perlawanan terhadap globalisasi dan neoliberalisme. Sejarah Amerika menunjukkan, resesi ekonomi yang terjadi di dunia baik pada awal abad ke-19 maupun tahun 2008, nyata berdampak besar kepada berbagai sektor pembangunan. Ketika depresi ekonomi 1929-1932, perdagangan internasional turun 50%; pengangguran meningkat tajam dan meningkatnya jumlah orang yang kehilangan tempat tinggal. Bahkan dampaknya juga bisa dirasakan ketika terjadi krisis ekonomi 1970an dan 80an, di mana diikuti oleh meningkatnya kasus bunuh diri sebesar 40%. Fenomena yang sama juga terjadi di Jepang (39%), Hong Kong (44%), Korea Selatan (45%) termasuk di

*) Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

Taiwan dan Singapura dengan tren yang sedikit lebih rendah (Chang, et.al, 2009). Pada krisis ekonomi 2008, Amerika Serikat yang sudah mempunyai fondasi ekonomi yang kokoh mengalami tekanan besar akibat meningkatnya pengangguran luar biasa terutama kaum pria. Akibatnya banyak warganya yang mengalami depresi (Dunlop and Mletzko, 2011). Dalam perkembangan selanjutnya, krisis ekonomi 2008 ternyata berdampak besar kepada arus migrasi terutama di kawasan Eropa. Martin (2009) menyatakan bahwa *"the current crisis to be the worst in a generation, and likely to affect international migration and remittances differently than past recessions."* Khusus masalah pekerja migran badan perburuhan internasional ILO percaya bahwa "pekerja migran sangat rentan terhadap gejolak pasar ekonomi dan tenaga kerja, karena mereka sering tidak menikmati hak yang sama dan perlindungan sebagai warga negara dari negara tujuan." (Awad, 2009). Pasca krisis global 2008, Malaysia juga kebanjiran pekerja migran yang meningkat drastis (Ali Maksum, 2012).

Adapun kondisi ekonomi global saat ini, PBB menyatakan bahwa ekonomi global akan terus berkembang dengan tingkat sedang sebesar 2,6 persen pada 2014. Untuk tahun 2015, keadaan ekonomi dunia masih lambat karena berbagai faktor dan tantangan baru terutama terkait konflik geopolitik di berbagai belahan dunia. Geopolitik Asia-Pasifik terkait Laut Cina Selatan, konflik di Syria, Yaman dan terorisme internasional sudah pasti akan mempengaruhi naik turun perkembangan ekonomi dunia. Dampaknya, arus migrasi terutama dari daerah konflik akan terus terjadi baik dalam rangka mencari perlindungan politik maupun ekonomi. Karena itu, kita tidak perlu *taken for granted* - mengikuti arus globalisme dan neoliberalisme, karena dampak negatifnya bukan hanya kemerosotan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran tetapi juga memperparah situasi kehidupan, di negara-negara berkembang dan juga Indonesia.

*) Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

Pembangunan (di) Indonesia salah satu korban neoliberalisme, satu per satu sektor-sektor publik yang semula diurus negara dilucuti dan diserahkan kepada mekanisme pasar, seperti sektor pangan, migas, listrik, BUMN, pendidikan, dan kini akan menyusul air. Secara internasional memburuknya permasalahan sosial global bermuara pada kesenjangan sosial-ekonomi antara negara maju dan berkembang, meningkatnya ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju, serta menguatnya dominasi negara kapitalis atas faktor-faktor produksi negara berkembang telah melahirkan dan bahkan memperparah tragedi kemanusiaan. Sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang, melemahnya peran negara ini seringkali menjadi pemicu disintegrasi sosial dan nrunculnya permasalahan sosial "lokal".

Eksklusi sosial: Makna dan Fokus

Istilah Eksklusi sosial menunjukkan adanya sekelompok orang miskin, menganggur dan kurang beruntung yang tersingkir atau disingkirkan dari kehidupan masyarakat yang normal. Dalam model kehidupan manusia seperti ini, Michael Sheppard (2006), menyatakan:

Meaning of social exclusion, socially excluded groups, therefore, are those who are: suffering poverty, unemployment and associated multiple disadvantage; who are deprived of their full rights as citizens; or whose social ties are damaged or broken.

Those in poverty, however, are not necessarily the only groups which may be considered excluded, and a description of such groups expresses a litany of those populations with which social work is centrally concerned. Dowling comments (1999): Social exclusion suggests an isolation which is not necessarily connected to financial hardship. Those who are, for example gay or female, or working class or older, or who have disabilities or are from a different ethnic group can be excluded by individual prejudices and by the stigmatising policies and structures of the wider society.

*) Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

Makna Eksklusi sosial menggambarkan bahwa inti dari kehidupan kelompok yang terisolasi secara sosial adalah mereka yang hidupnya dalam kemiskinan, menganggur dan hidup dalam kekurangberuntungan; tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan; dan kehancuran ikatan sosial. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor keuangan yang tidak cukup, ketidakmampuan atau dari kelompok etnik yang berbeda; mereka tersingkir karena prasangka dan stigmatisasi kebijakan dan struktur masyarakat yang lebih luas. Eksklusi sosial terjadi ketika ada kelompok mengalami perbedaan perlakuan, dimana setiap manusia berhak menerima perlindungan dan kesejahteraan. Beall dan Piron (2005) menjelaskan, *Social Exclusion* merupakan *proses peminggiran sosial terhadap beberapa kelompok yang didiskriminasikan atas dasar etnis, ras, agama, orientasi seksual, kasta, keturunan, gender, usia, kecacatan, HIV, migran atau berdasarkan lokasi di mana mereka tinggal*. Mereka juga dirugikan karena lokasi tempat tinggal tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan.

Eksklusi sosial adalah satu konsep yang digunakan dalam aktivitas pengembangan masyarakat dan studi sosial, karena berkaitan dengan perancangan sosial, analisis kebijakan sosial dan praktik pembangunan sosial di banyak negara maju. Konsep eksklusi sosial ini muncul di Copenhagen pada tahun 1995. Eksklusi sosial memperluaskan analisis kemiskinan dengan memberi tumpuan kepada analisis sebab dan dampak sosial. Konsep ini telah mula digunakan oleh Jabatan Pembangunan Sosial di Departemen Pembangunan Inggris (DFID) tahun 1997 dengan istilah *Social Exclusion Unit* (SEU) (Beall & Piron, 2005). Istilah eksklusi sosial ini merujuk kepada kekurangan dan marginalitas (Batsleer 8s Humphries, 2000). Kelompok orang-orang yang mengalami eksklusi sosial ditetapkan atas dasar etnik, ras, agama, orientasi seksual, kasta, keturunan, gender, umur, kecacatan, HIV, pekerja migran bermasalah, orang miskin, anak terlantar, warga tua terlantar, orang tua tunggal, atau berdasarkan lokasi di mana mereka tinggal (Batsleer 8s Humphries, 2000; Beall 8s Piron, 2005; Jordan, 1996; Levitas, 1996; G. Room,

*] Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

1995), secara lebih luas di dalamnya terdapat pengangguran, kemiskinan yang rendah, kekurangan perumahan, tingkat kriminalitas yang tinggi, kesehatan yang rendah dan perpecahan keluarga (Bonner, 2006).

Eksklusi sosial meliputi pelbagai aspek kehidupan. Istilah ini menunjukkan sekumpulan *orang miskin, menganggur dan kurang bernasib baik yang tersingkir atau disingkirkan dari kehidupan masyarakat biasa* (Sheppard, 2006). Di Indonesia, disebut kumpulan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain seperti: *gelandangan, pengemis, orang kurang upaya, kanak-kanak yang hidup di jalan, warga tua terbiar, wanita sebagai ketua isi rumah yang bukan saja mengalami masalah ekonomi, tetapi juga mengalami peminggiran sosial akibat diskriminasi, stigma dan eksploitasi* (Suharto, 2009).

Eksklusi sosial sebagai individu, kumpulan atau masyarakat yang kurang bernasib baik dan tersingkir atau disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Kumpulan ini menjadi sasaran program dan aktivitas pemerintah atau masyarakat lokal. Jenis eksklusi sosial adalah kumpulan yang tersingkir: 1) etnik/suku bangsa; 2) ras - warna kulit; 3) agama; eksklusi sosial berdasarkan keyakinan individu; 4) orientasi seksual; gay atau lesbian; 5) kasta; berdasarkan tingkatan dalam kehidupan sosial dalam agama Hindu; 6) keturunan; 7) gender, berkaitan dengan akses dan kawalan kepada sumber; 8) umur; 9) orang kurang upaya; 10) HIV; 11) pekerja migran bermasalah; 12) individu yang miskin; 13) anak terbiar; 14) warga tua terbiar; 15) orang tua tunggal; 16) peminggiran sosial berdasarkan lokasi di mana mereka tinggal. Kumpulan sasaran ini dalam Kementerian Sosial RI disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Eksklusi sosial adalah konsep yang menerangkan 1) perkara keadaan atau hasil; 2) proses yang dinamik. Sebagai keadaan atau hasil, eksklusi sosial

*] Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

adalah keadaan di mana individu atau kumpulan tidak boleh berperanan sepenuhnya dalam masyarakat karena identitas sosial seperti bangsa, gender, etnik, kasta atau agama dan lokasi seperti kawasan pedalaman, kawasan perang atau konflik. Eksklusi sosial sebagai proses yang dinamik merujuk kepada hubungan sosial dan institusi yang menghalang pencapaian keperluan hidup, pembangunan manusia dan hak-hak yang sama sebagai warganegara. Perkara ini mewujudkan kemiskinan dan ketidaksamaan, serta membatasi penyertaan sosial. Eksklusi sosial sebagai suatu proses yang dinamis diatur oleh hubungan sosial dan politik serta akses kedalam organisasi dan institusi kekuasaan. Eksklusi sosial adalah proses dan keadaan yang mencegah individu atau kumpulan untuk berperanan sepenuhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik dan dalam menyatakan hak yang berasal dari hubungan keterpinggiran dari kekuasaan (Beall & Piron, 2005; Pierson, 2002).

Eksklusi sosial merupakan proses dan hasil. Eksklusi sosial sebagai proses bila terdapat hambatan dari institusi dalam pencapaian keperluan hidup, pembangunan manusia dan hak-hak yang sama sebagai warganegara, Artinya terdapat program dan aktivitas yang tidak mencapai kumpulan sasaran. Eksklusi sosial sebagai hasil yaitu suatu keadaan di mana individu atau kumpulan tidak mampu berperanan sepenuhnya dalam masyarakat kerana identitas sosial seperti suku bangsa, gender, etnik, kasta atau agama dan lokasi seperti kawasan pedalaman, kawasan perang atau konflik.

Makna eksklusi sosial terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, komitmen utamanya adalah perhatian dan intervensi yang perlu dilakukan. Dalam aktivitas eksklusi sosial adalah bagaimana menggali dan mendalami secara rinci untuk memetakan dimensi utama dari kehidupan masyarakat. Dalam usaha ini boleh difahami tentang apa yang perlu direalisasikan karena berkaitan dengan penyelesaian masalah sosial, dukungan keluarga dan teman

*/ Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

untuk membantu mengaktifkan anggota masyarakat dan menjadikan kehidupan lebih baik (Sheppard, 2006).

Berasaskan konsep eksklusi sosial, boleh dilihat makna dan fokus sebagai berikut.

Eksklusi Sosial: Makna dan Fokus

No.	*] Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program
Sumber/Tah	Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi
	Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

No.
Sumber/Tah
u

Makna dan Fokus

	Piron (2005)	perbezaan perlakuan kepada orang atau kumpulan, di mana semua manusia berhak menerima perlindungan dan kesejahteraan. Eksklusi sosial adalah suatu proses peminggiran kepada pelbagai kumpulan yang di diskriminasikan atas dasar etnik, ras, agama, orientasi seksual, kasta, keturunan, gender, umur, kecacatan, HIV, pekerja migran atau berdasarkan lokasi di mana mereka tinggal. Mereka juga dirugikan karena lokasi tempat tinggal <u>tidak disentuh oleh aktivitas pembangunan</u>
8.	Sheppard (2006)	Eksklusi sosial meliputi pelbagai aspek kehidupan; sekumpulan orang miskin, menganggur dan kurang bernasib baik yang tersingkir atau disingkirkan dari kehidupan masyarakat yang normal.
9.	Bonner (2006)	Eksklusi sosial, terdapat pengangguran, kemahiran yang rendah, ketiadaan perumahan, tahap kriminalitas yang <u>tinggi, kesehatan yang rendah dan perpecahan keluarga.</u>
10.	Suharto (2009)	Eksklusi sosial, kumpulan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Menteri Sosial Republik Indonesia, 2012); gelandangan, pengemis, orang kurang upaya, anak-anak jalanan, warga tua terlantar, wanita sebagai kepala keluarga yang bukan saja mengalami masalah ekonomi, tetapi juga mengalami peminggiran sosial akibat diskriminasi, stigma dan eksploitasi.
11.	Fraser (2010)	Eksklusi sosial ialah kewujudan ketidaksamaan dalam kasus masyarakat miskin global, tetapi tidak diartikan sebagai kekurangan ekonomi atau tidak menghormati budaya.

Eksklusi sosial fokus kepada 2 aspek internal dan eksternal. Dari aspek internal, eksklusi sosial meliputi kekurangan yang dimiliki oleh individu, kelompok atau masyarakat karena terdapat pengangguran, kemahiran yang rendah, kesehatan yang rendah, etnik, HIV dan pekerja migran. Eksternal eksklusi sosial eksternal meliputi kebijakan, kemiskinan, lokasi kediaman

*) Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

yang tidak tersentuh oleh aktivitas pembangunan dan terdapat diskriminasi gender.

Dimensi Eksklusi Sosial

Eksklusi sosial, terdapat 5 (lima) dimensi utama; dari keuangan ke arah keburukan multi-dimensi (G. J. Room, 1999). Indikator eksklusi sosial; berpendapatan rendah dan mengakibatkan kerugian sebanyak multidimensi meliputi kemiskinan dan perumahan yang buruk, kegagalan pendidikan, eksklusi yang terbatas yang diperlukan dalam pasaran kerja, pelbagai gangguan kesehatan dan penyakit; 2) dari analisis statik menuju dinamik. Eksklusi sosial melihat faktor-faktor yang dapat membawa kepada keadaan yang lemah dan memahami bagaimana bentuk dan akibat yang muncul. Pendidikan yang lemah, pengangguran, orang kurang upaya, ibu tunggal adalah yang paling berisiko jatuh ke dalam kemiskinan; 3) dari fokus sumber individu dan keluarga kepada komunitas lokal. Eksklusi sosial tidak hanya disebabkan sumber pribadi yang terbatas tetapi juga fasilitas masyarakat yang terbatas seperti sekolah rusak, kedai yang jauh, transportasi terbatas, dan cenderung mengukuhkan kemiskinan keluarga (Robson, 1995); 4) dari distribusi kepada perkerkaitan. Eksklusi sosial memberi tumpuan kepada isu-isu pengangkutan yaitu penyertaan yang tidak mencukupi, kekurangan integrasi sosial dan kekuasaan yang terbatas. Dalam hubungannya dengan dimensi ketidaksamaan gender berhubungan dengan pekerjaan yang tidak dibayar dalam keluarga (Levitas, 1996). Perkaitan ini termasuklah hubungan masyarakat dan tempat kerja, organisasi formal, jabatan perumahan, sekolah, layanan kesehatan lokal. Eksklusi sosial terkait dengan hubungan kesejahteraan birokrasi dan pelanggan, tuntutan manfaat dan bantuan sosial lokal, pasien pencari fasilitas kesehatan; 5) Dari ketidaksamaan ke arah kelestarian. Eksklusi sosial berkaitan dengan kekurangan peluang kerja, layanan publik berkualitas yang terbatas. Eksklusi sosial digunakan sebagai

*) Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

alat dalam bentuk kebijakan yang menghubungkan dengan masyarakat yang lebih luas.

Dimensi eksklusi sosial dibagikan kepada pelbagai komponen (Beall & Piron, 2005): 1) mengacu pada individu, termasuk peminggiran individu dari pasaran tenaga kerja atau dalam kategori kumpulan, seperti kasta atau kumpulan minoritas; 2) pendekatan hubungan sosial yang menitikberatkan pada eskklusi dan aktor, meletakkan kuasa di pusat analisis seperti memastikan dan memberi reaksi terhadap peraturan-peraturan yang meletakkan pekerja dan pemilik yang bertanggungjawab kepada minoritas; 3) dimensi institusi yang melibatkan organisasi dan proses peminggiran dalam membuat keputusan, seperti warga negara yang tidak terlibat dalam membuat keputusan; 4) dimensi sebab akibat yang menjelaskan bahwa fokus eksklusi tidak hanya kemiskinan tetapi juga faktor-faktor yang menyebabkan ia dan pelbagai bentuk kelemahan sosial lain seperti rasial dan intoleransi beragama yang menyebabkan akses yang terbatas kepada pasaran kerja dan pendidikan; 5) proses pelbagai dimensi yang meliputi aspek kerugian sosial seperti kemiskinan dan diskriminasi gender contohnya status minoriti gender, etnik dan agama. Pelbagai pemahaman dimensi eksklusi sosial, seperti berikut ini.

*) Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

Dimensi Peminggiran Sosial

Dimensi Peminggiran Sosial	Ciri-ciri	Sumber
Individual	Kesehatan fisik, pendidikan, kejadian pada kehidupan individu, orang kurang upaya, ibu tunggal. Room,	(Burchardt et al., 1999; Pierson, 2002; G.J. Room, 1999; Suharto, 2009)
Sosial	Ketidaksamaan dan ketidakadilan, lokasi, gender, usia, etnik, praktek budaya.	(Levitas, 1996; Sheppard, 2006)
Ekonomi	Masalah kewangan, pengangguran, kelangkaan sumber.	(Bonner, 2006)
Sosial-ekonomi-politik	Kemiskinan, marginalisasi politik, aktivitas berpolitik terbatas.	(Batsleer & Humphries, 2000; Dowling, 1999)
Institusi dan organisasi	Peraturan, kebijakan dan proses	(Beall & Piron, 2005)

Sumber: Diadaptasi daripada Tambulasi, R. I. C. (2009). Pushed to the abyss of exclusion: ICT and social exclusion in developing countries. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 7(2/3), 119-127. doi: 10.1108/14779960910955837

Gambaran di atas menunjukkan dimensi eksklusi sosial ini tidak dapat dipisahkan manakala melihat satu masalah sosial kerana dipengaruhi oleh dimensi yang lain, sebab masalah-masalah sosial dan keluarga sangat kompleks dan boleh dilihat dari pelbagai dimensi. Eksklusi sosial diukur daripada pendapatan yang rendah, keadaan yang lemah, fasilitas masyarakat terbatas, peranserta terbatas, kekurangan peluang kerja dan perkhidmatan sosial. Dalam kemiskinan, dimensi yang menjadi ciri-ciri eksklusi sosial meliputi ekonomi, sosial, politik, kejiwaan, individu dan kumpulan. Semua itu mempunyai dampak kepada kemiskinan, ketiadaan perumahan, pendidikan rendah, kemahiran terbatas, gangguan kesehatan, pengangguran, orang kurang upaya, dan ibu tunggal. Ketidaksamaan gender berkaitan dengan

*) Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV, Manado, 20-23 Mei 2015.

pekerjaan yang tidak dibayar dalam keluarga seperti pada aktiviti kerja bakti, wanita kerja sukarela memasak untuk lelaki yang bekerja membersihkan persekitaran dan lelaki diberikan upah dalam pekerjaannya.

Di Indonesia eksklusi sosial di Kementerian Sosial RI disebut PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) diantaranya kesulitan ekonomi, melainkan juga mengalami pengucilan sosial akibat diskriminasi, stigma dan eksploitasi (Suharto, 2009). Dalam kerja sosial, *social exclusion* menjadi pusat kepedulian dan memastikan untuk terlibat dalam inklusi dan integrasi. (Sheppard, 2006).

Penutup

Falsafah yang mendasar dalam makna Eksklusi Sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan dan komitmen, serta pentingnya perhatian agar tindakan dan kebijakan untuk eksklusi sosial dilakukan. Dalam kegiatan Eksklusi Sosial adalah bagaimana mengeksplorasi secara mendalam dan detail dengan memetakan dimensi-dimensi utama eksklusivitas sosial. Dalam tatanan ini kita dapat benar-benar memahami tentang apa yang pasti wujud, karena semua ini terkait dengan ilmuan sosial, seperti sosiologi dan profesi Pekerjaan Sosial. Aktivitas kebijakan, perencanaan dan layanan Sosial ini dapat menyumbang untuk menyelesaikan dan mempromosikan eksklusi sosial Permasalahan Kesejahteraan Sosial); mendukung keluarga dan sahabat dengan membantu mengaktifkan kembali anggota-anggota masyarakat, hingga menjadikan hidup lebih baik.

Rujukan

- Awad, Ibrahim. 2011. *The global economic crisis and migrant workers: Impact and response* (Geneva: International Labour Office, International Migration Programme).
- Batsleer, J., & Humphries, B. (2000). *Welfare, exclusion and political agency*. London: Routledge.
- Beall, J., & Piron, L. H. (2005). *DFID social exclusion review*. London: The London School of Economics and Political Science.
- Beets, Gijs and Willekens, Frans, *The Global Economic Crisis and International Migration: An Uncertain Outlook* (The Hague: European Commission, 2009).
- Banner, A. (2006). *Social exclusion and the way out, an individual and community response to human social dysfunction*. UK: John Wiley & Sons, Ltd.
- Bradshaw, J., Kemp, P., Baldwin, S., & Rowe, A. (2004). *The drivers of social exclusion: A review of the literature for the social exclusion unit in the breaking the cycle series*. London: Office of the Deputy Prime Minister.
- Brar.deil. J. R., Varkas, T., & Thyer, B. A. (2010). *The handbook of social work research methods*. United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Chang S.S., Gunnell D., Stern J.A., Lu T.H., Cheng A.T. 2009. "Was the economic crisis 1997-1998 responsible for rising suicide rates in East/Southeast Asia?," *Social Science and Medicine* (68): 1322-1331.
- Davis, A. (2007). *Structural approaches to social work*. London: Jessica Kingsley.
- Deacon, Bob (2000), *Globalization and Social Policy: The Threat to Equitable Welfare*, Geneva: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Dominelli, L. (2004). *Social work: Theory and practice for a changing profession*. Cambridge London: Polity Press.
- Dunlop B.W., Mletzko T. 2011. "Will current socio-economic trends produce a depressing future for men? *British Journal of Psychiatry* (198): 167-168 (2011).
- Esping-Andersen, Gosta (1996), "After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy" dalam Gosta Esping-Andersen (ed), *Welfare States in Transition*, London: Sage Publication (UNRISD).
- Jordan, B. (1996). *A theory of poverty and social exclusion*. Oxford, Inggris: Polity Press Cambridge.

*) Makalah disajikan dalam Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi

- Levitas, R. (1996). The concept of social exclusion and the new Durkheimian hegemony. *Critical Social Policy*, 16(46), 5-20.
- Maksum, Ali. 2012. "Rakyat Pikul Beban Kerajaan?: Kemelesetan Ekonomi Global: Cabaran dan Kesan Terhadap Malaysia," *Jurnal Pemikir* (67):85-104.
- Mamap Ismy. 2012. *Konsep dan Makna Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam*, Available in <http://skripsites4u.blogspot.com/2012/07/konsep-dan-makna-kesejahteraan-dalam.html> (accessed 25 February 2014).
- Martin, P. 2009. "The recession and migration: alternative scenarios." *Working Papers* 13, Oxford, International Migration Institute.
- Mishra, Ramesh (1999), *Globalization and the Welfare State*, Cheltenham: Edward Edgar Mkandawire, Thandika dan Virginia Rodriguez (2000), *Globalization and Social Development after Copenhagen*, Geneva: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Muhamad Fadhil Nurdin, 2015, *Sociology and Policy Practices in Contemporary Issues*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta.
- , 2015, *Sociology and Welfare Development*, Penerbit Samudra Biru, **Yogyakarta**.
- , 2011, *Kedaulatan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Kesejahteraan Sosial*, Puslitbang KPK LPPM Unpad, Bandung.
- Mullaiy, B. 2002. *Challenging oppression: A critical social work approach*. Don Mills, ON: Oxford University Press.
- Pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, Nomor 08 Tahun 2012 C.F.R. (2012).
- Room, G. (1995). *Beyond the threshold: the measurement and analysis of social exclusion*. Bristol, Luxembourg: The Policy Press.
- Rubin, A., & Babbie, E. R. (2008). *Research methods for social work* (6th ed.). Australia: Thomson Brooks/Cole.
- Sheppard, M. (2006). *Social work and social exclusion: the idea of practice*. United State of America: Ashgate Publishing Company.
- Stiglitz, Joseph E. (2003), *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional* (terjemahan), Jakarta: PT Ina Publikatama.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia; menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*. Bandung: Alfabeta.

Zaid, H., & Barise, A. (2004). Mafhum Al-Faqr Fil Islam. [The concept of poverty in Islam]. Proceedings of the International Conference on Poverty in the Muslim World and Communities: Causes and solutions: Vol. 2, (pp. 161-180). Kuala Lumpur, Malaysia: IIMU.

United Nations Development Programme (UNDP) (2002), Human Development Report 2002, New York: Oxford University Press.

Ward, N. (2009). Social exclusion, social identity and social work: Analysing social exclusion from a material discursive perspective. *Social Work Education*, 28(3), 237-252.

World Economic Situation and Prospects 2015 (New York: United Nations, 2015).

APSSI



**ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)
KERJASAMA
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Sertifikat

Diberikan Kepada:

Muhamad Fadhil Nurdin

Sebagai :

Pemakalah

Dalam Kegiatan

**KONGRES II ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
DAN KONGRESI NASIONAL SOSIOLOGI INDONESIA IV**

Dengan Tema

**"MEMPERKUAT PERAN APSSI UNTUK MEMPENGARUHI
KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL"**

Hotel Arya Duta, Manado 20-23 Mei 2015

Pengurus APSSI

Dr. M. Najib Azca, MA
Ketua Umum

**Fakultas Ilmu Sosial & Politik
Universitas Sam Ratulangi**



Drs. Philep M. Regar, M.S.
Dekan